

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandra., dkk. (2025). Lelang Elektronik (e-Auction) Teori & Praktik. Masonari.
- Hermin, (2024). Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mantayborbir, S., & Jauhari, I. (2003). Hukum Lelang Negara di Indonesia. Penerbit Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Salim., M. S. (2021). "*Peraturan jabatan notaris*". Sinar Grafika. hlm. 12
- Usman, R. (2022). Hukum Lelang. Sinar Grafika.
- Yenny Febrianty, (2023). Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia. CV. Green Publisher Indonesia.

Perundang-Undangan

- Penjelasan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta, Lelang Melalui Internet.
- Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. tentang Petunjuk PelaksanaanLelang.
- Penjelasan Pasal 1868 Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang KUH Perdata
- Penjelasan Pasal 37 Vendu Reglement tentang Peraturan Lelang.
- Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Psl. 9 angka 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang, Psl 1 angka 34.

Jurnal

- Begiyama Fahmi Zaki, (2020). Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online, Fiat Justicia Journal of Law, Vol. 2, No. 2 April-June 2016, h. 5.

- Benny Riyanto, (2008). Lelang melalui Internet, Jurnal Hukum Uninssula, Vol. 15, hlm. 10.
- Departemen Keuangan, (2007). "Pengetahuan Lelang: Penghapusan BMN, "Modul"", Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, hlm. 1.
- Diah Sulistya Ratna Sediati, (2010). "Peranan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia", Jurnal MMH, Jilid 39, No. 2.
- Fransiscani Br Turnip, Lydia. (2023). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace*. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No 3, Hlm. 733-741.
- Manora., dkk. (2022). "Kewenangan pejabat lelang kelas II terhadap minuta risalah lelang yang lebih batas waktu." Jurnal Cakrawala Hukum 13.1 2022: Hlm.100.
- Rizqy., dkk. (2023). Pengaruh Media Teknologi Informasi Modern Terhadap Aktivitas Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 22-42.
- Runi Viola, (2017). "Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No.2, hlm. 259.
- Susilo., dkk. (2023). Analisis Yuridis Implementasi ArtificialIntelligent Dalam Praktek Kenotariatan. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Vol. 8 No. 02 Agustus 2023 e-ISSN: 2502-7573 p-ISSN: 2502-89601.

Lain-lain

- Amel Saha ,Wawancara pribadi oleh penulis. 15 April 2025.
- Umi Salikah, Wawancara pribadi oleh penulis, 12 April 2025.